
**ANALISIS DETERMINAN PERMINTAAN MASYARAKAT KOTA TANGERANG
TERHADAP JASA PENGIRIMAN PAKET POS PADA PT. POS INDONESIA (PERSERO)
CABANG KOTA TANGERANG**

Novi Nurwanto¹Hilda² Apriyanto³
Program Studi D-3 Manajemen Perusahaan
Politeknik Tunas Pemuda Tangerang
Jl. K.H.M. M. Dahlan, Tangerang, Banten, Indonesia
**novinurwanto@gmail.com¹, hilda@politeknik-tunaspemuda.ac.id²,
irapriyanto0604@gmail.com³**

ABSTRAK

PT. Pos Indonesia (Persero) adalah salah satu perusahaan yang telah dikenal luas eksistensinya oleh masyarakat sebagai sarana komunikasi dan juga memberikan layanan pengiriman barang. Sekarang ini, dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pengiriman barang menyebabkan persaingan bisnis yang dihadapi perusahaan semakin ketat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pendapatan, tingkat pelayanan, dan tarif pengiriman paket pos terhadap permintaan jasa pengiriman paket pos pada PT. Pos Indonesia (Persero) Cabang Kota Tangerang. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Untuk menghitung besarnya koefisien data tersebut menggunakan model persamaan regresi linier berganda dengan bantuan program komputer E-views 5.1. Dari hasil pengolahan data R² (koefisien determinasi) sebesar 0,84 sehingga diketahui bahwa variabel pendapatan, tingkat pelayanan, dan tari pengiriman paket pos mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap permintaan jasa pengiriman paket pos.

Kata Kunci : PT. Pos Indonesia, Analisis Determinan, Jasa Pengiriman.

ABSTRACT

PT. Pos Indonesia (Persero) is a company whose existence is widely known by the public as a means of communication and also provides goods delivery services. Nowadays, with the increasing public demand for goods delivery services, the business competition faced by companies is getting tighter. This research aims to analyze the influence of income, service level, and postal package delivery rates on demand for postal package delivery services at PT. Pos Indonesia (Persero) Tangerang City Branch. The data used in this research are primary data and secondary data. To calculate the magnitude of the data coefficient using a multiple linear regression equation model with the help of the E-views 5.1 computer program. From the results of data processing, R² (coefficient of determination) is 0.84, so it is known that the variables income, service level, and postal package delivery rates have a significant influence on demand for postal package delivery services.

Keywords: PT. Pos Indonesia, Determinant Analysis, Delivery Services.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pelaksanaan pembangunan nasional pada dasarnya bertujuan untuk menciptakan tata kehidupan ekonomi, sosial, politik yang lebih baik dimasa mendatang. Oleh karena itu dalam melakukan penyusunan program pembangunan harus bertitik tolak pada permasalahan pembangunan baik yang mendukung lajunya pembangunan maupun yang menghambat pembangunan sehingga dapat disusun suatu strategi pembangunan nasional atau pembangunan daerah.

Dalam GBHN 1998 bahwa pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional diarahkan untuk memacu pemerataan pembangunan dan hasilnya dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, menggalakkan prakarsa dan peran serta aktif masyarakat untuk meningkatkan pendayagunaan potensi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggung jawab serta memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan tingkat kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun, oleh karena itu untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus menghitung laju pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pertumbuhan ekonomi pada prinsipnya harus dinikmati penduduk, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum tentu dapat dinikmati penduduk jika pertumbuhan penduduk jauh lebih tinggi (Suseno, 1990:35).

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun (Sadono, 1985:19). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan pendapatan dari berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga berlaku atau harga konstan. Sehingga perubahan dalam nilai pendapatan hanya disebabkan oleh suatu perubahan dalam tingkat kegiatan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan akan perkembangannya apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi daripada yang dicapai pada masa sebelumnya.

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator untuk menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Indikator tersebut tidak hanya menunjukkan bagaimana hasil-hasil pembangunan tersebut didistribusikan dan siapa saja yang sesungguhnya menikmati pertumbuhan ekonomi tetapi seberapa jauh pembangunan telah berhasil menyejahterakan masyarakatnya. Untuk daerah seperti Kabupaten Tangerang yang pada tahun 2014 jumlah penduduknya 844.889 jiwa serta diketahui pertumbuhan PDRB yang semakin jauhnya tahun krisis ekonomi 1997, sehingga saat ini pertumbuhan ekonomi terlihat agak lebih stabil. Hal ini terlihat dari pertumbuhan PDRB sampai dengan tahun 2014 di mana tiga tahun terakhir menunjukkan angka yang relatif stabil pada kisaran angka 3,00 persen dan 4,00 persen, di antaranya tahun 2012 sebesar 3,34 persen, tahun 2013 sebesar 3,90 persen dan tahun 2014 sebesar 3,79 persen (BPS,2003:11). Hal ini menunjukkan bahwa perbaikan perekonomian Kabupaten Tangerang semakin disempurnakan, sehingga pertumbuhan ekonomi menjadi sangat penting dan pertumbuhannya harus lebih besar dari laju pertumbuhan penduduk sehingga peningkatan pendapatan per kapita penduduk, pendapatan daerah dapat tercapai. Tetapi keberhasilan pembangunan suatu daerah tidak hanya dapat diukur melalui kemampuannya dalam meningkatkan pendapatan daerah, pendapatan per kapita, PDRB maupun indikator sejenis lainnya.

Masalah distribusi pendapatan mengandung dua segi, segi pertama yaitu bagaimana menaikkan taraf hidup mereka yang masih berada di bawah garis kemiskinan, sedangkan segi kedua adalah pemerataan pendapatan secara menyeluruh, dalam arti perbedaan pendapatan antar penduduk/antar rumah tangga.

Dengan kata lain segi yang pertama merupakan masalah tingkat kemiskinan absolut sedang segi yang kedua lebih berhubungan dengan distribusi pendapatan. Keberhasilan mengatasi segi yang pertama dilihat dari penurunan persentase penduduk yang masih berada di bawah garis kemiskinan, keberhasilan ini dapat memperbaiki distribusi pendapatan secara menyeluruh jika laju pertumbuhan pendapatan golongan miskin lebih besar dari laju pertumbuhan pendapatan golongan kaya.

Distribusi pendapatan tidak cukup diatasi jika hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi dengan harapan bahwa pendapatan nasional tersebut akan menetes kebawah, perlu usaha semaksimal mungkin untuk mengatasi masalah distribusi pendapatan ini. Dengan lebih memusatkan perhatian pada kualitas dari proses pembangunan masalah distribusi pendapatan ini semakin terasa karena adanya pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat selama orde baru yang tidak diikuti dengan pemerataan distribusi pendapatan (Sugiarto, 2002:2).

Sedangkan didalam pembangunan ekonomi suatu daerah selalu muncul polemik dalam menentukan strategi dasar pembangunannya, yaitu memilih garis pertumbuhan ekonomi atukah pemerataan pendapatan. Beberapa pakar ekonomi berpendapat bahwa laju pertumbuhan ekonomi yang cepat sudah tidak dapat lagi dipakai untuk mengurangi kemiskinan. Sementara kemiskinan merupakan realita dalam kehidupan ekonomi di negara yang sedang berkembang. Sebaliknya di negara yang maju semangat untuk meningkatkan pendapatan merupakan tujuan paling penting dari segala kegiatan ekonomi. Tingginya pertumbuhan ekonomi suatu daerah memang tidak menjamin pemerataan pendapatan, namun pertumbuhan ekonomi yang cepat tetap dianggap merupakan strategi unggul dalam pembangunan ekonomi (Prayitno, 1986:68).

Perlunya langkah-langkah peninjauan kembali terhadap segenap prioritas pembangunan di Kabupaten Tangerang semakin dirasakan, Meskipun laju pertumbuhan ekonomi tidak secara otomatis memberikan jawaban atas berbagai masalah kesejahteraan, namun hal tersebut tetap merupakan unsur penting dalam setiap program pembangunan daerah. Pada hakekatnya pembangunan daerah dianjurkan tidak hanya memusatkan perhatian pada pertumbuhan ekonomi saja namun juga mempertimbangkan bagaimana distribusi pembangunan itu. Selama ini pertumbuhan ekonomi dan hasil pembangunan tidak dinikmati secara adil dan merata oleh seluruh masyarakat maka timbul persoalan distribusi pendapatan. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan. Karena pentingnya masalah pertumbuhan ekonomi dan distribusi pendapatan dalam pembangunan ekonomi.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu perubahan tingkat kegiatan ekonomi yang berlangsung dari tahun ke tahun (Sadono,1985:19), sehingga untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi harus dibandingkan pendapatan nasional dari berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga konstan dan harga berlaku. Perubahan dalam nilai pendapatan nasional hanya disebabkan oleh suatu perubahan dalam suatu tingkat kegiatan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Boediono,1999:1). Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output per kapita. Di sini ada dua sisi penting yaitu output total dan jumlah penduduk. Output per kapita adalah output total dibagi jumlah penduduk. Aspek ketiga dari definisi pertumbuhan ekonomi adalah perspektif waktu jangka panjang. Kenaikan output per kapita selama satu atau dua tahun, yang kemudian diikuti dengan penurunan output per kapita bukan pertumbuhan ekonomi. Suatu perekonomian dikatakan tumbuh apabila dalam jangka waktu 5 tahun mengalami kenaikan output per kapita.

Menurut Kuznets dalam (Todaro,2000:144) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari suatu negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri

ditentukan atau di mungkinkan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian-penyesuaian teknologi, institusional dan ideologis terhadap berbagai keadaan yang ada.

Dari berbagai definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa suatu proses perekonomian dikatakan mengalami suatu perubahan atau pertumbuhan apabila tingkat kegiatan ekonomi adalah lebih tinggi daripada yang dicapai pada waktu sebelumnya. Dengan kata lain, perkembangan baru tercipta apabila jumlah fisik barang-barang dan jasa-jasa yang dihasilkan bertambah besar pada tahun berikutnya. Sedangkan, untuk mengetahui apakah suatu perekonomian mengalami pertumbuhan perlu ditentukan perubahan yang sebenarnya terjadi dalam kegiatan-kegiatan ekonomi dari tahun ke tahun tersebut.

2.2. Laju Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi adalah suatu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang (Suseno,1990:35). Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat pertumbuhan agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan tahun sebelumnya (BPS,1999:9). Dari berbagai definisi di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa laju pertumbuhan ekonomi adalah proses kenaikan pendapatan secara agregat masing-masing tahun dibandingkan tahun sebelumnya.

2.3. Produk Domestik Regional Bruto

Di dalam menghitung Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang ditimbulkan dari suatu region, ada 3 pendekatan yang digunakan (BPS, 2003:2), yaitu:

- **PDRB menurut pendekatan produksi**

PDRB menurut pendekatan produksi merupakan jumlah nilai produksi neto barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi dalam suatu region selama jangka waktu tertentu yaitu satu tahun. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi lapangan usaha yaitu:

1. Pertanian
2. Pertambangan dan Penggalian
3. Industri Pengolahan
4. Listrik, Gas dan Air Bersih
5. Kontruksi
6. Perdagangan, Rumah Makan dan Jasa Akomodasi
7. Angkutan, Pergudangan dan Komunikasi
8. Lembaga Keuangan, Real Estate, Persewaan dan Jasa Perusahaan
9. Jasa-jasa (Pemerintahan, Sosial, kemasyarakatan, Hiburan dan Perorangan)

2.3.2. PDRB menurut pendekatan pendapatan

PDRB menurut pendekatan pendapatan merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu region dalam jangka waktu tertentu yaitu satu tahun. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan semuanya sebelum dipotong pajak penghasilan dan pajak langsung lainnya. Dalam definisi ini, PDRB mencakup juga penyusutan dan pajak tak langsung neto sedangkan jumlah semua komponen pendapatan ini per sektor disebut sebagai nilai tambah bruto sektoral. Oleh karena itu PDRB merupakan jumlah dari nilai tambah bruto seluruh sektor (lapangan usaha).

2.3.2. PDRB menurut pendekatan pengeluaran

PDRB menurut pendekatan pengeluaran adalah semua permintaan akhir seperti; pengeluaran konsumsi rumah tangga dan lembaga swasta yang tidak mencari untung, konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, perubahan stok dan ekspor neto dalam jangka waktu tertentu (biasanya setahun) sedangkan ekspor neto merupakan ekspor dikurangi dengan impor.

Dari ketiga pendekatan tersebut di atas yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan produksi. Sedangkan secara konsep jumlah pengeluaran harus sama dengan jumlah barang dan jasa akhir yang dihasilkan harus sama pula dengan jumlah komponen nilai tambah bruto termasuk di dalamnya balas jasa faktor produksi. Selanjutnya PDRB seperti yang telah diuraikan di atas disebut sebagai PDRB atas dasar harga pasar karena di dalamnya mencakup komponen pajak tidak langsung neto.

Untuk memudahkan pemakai data, maka hasil perhitungan PDRB disajikan menurut sektor ekonomi / lapangan usaha yang dibedakan menjadi 2 macam yaitu; PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB atas dasar harga berlaku merupakan semua angka mengenai PDRB dinilai atas dasar harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan, baik dalam menilai produksi, biaya antara maupun dalam menilai komponen nilai tambah dan komponen pengeluaran PDRB sedangkan PDRB atas dasar harga konstan merupakan semua angka mengenai PDRB dinilai atas dasar harga tetap, yaitu harga pada tahun dasar dalam hal ini adalah harga tahun 1993. Karena memakai harga tetap / konstan, maka perkembangan angka pendapatan regional dari tahun ke tahun semata-mata karena perkembangan riil/ nyata dan bukan dipengaruhi oleh perubahan harga baik harga naik maupun harga turun (BPS, 2003:7).

Sedangkan secara substansial perbedaan PDRB atas dasar harga berlaku dengan PDRB atas dasar harga konstan terletak pada penilaian PDRB atas dasar harga. Jika berdasarkan harga berlaku PDRB dihitung atas dasar harga yang berlaku pada tahun yang bersangkutan tetapi jika berdasarkan harga konstan PDRB dihitung atas dasar harga tetap, yaitu harga pada tahun dasar yang dalam hal ini adalah harga tahun 1993.

2.3.3. Perubahan Struktur Ekonomi

Perubahan di dalam struktur ekonomi biasanya ditunjukkan dengan adanya perkembangan kontribusi antara sektor pertanian dan sektor industri terhadap pembentukan PDRB. Dalam GBHN tahun 1993 ditegaskan bahwa pembangunan jangka panjang harus mampu membawa perubahan fundamental dalam struktur ekonomi sehingga produksi nasional yang berasal dari berbagai sektor tetapi diluar sektor pertanian akan semakin besar dan sektor industri yang diharapkan menjadi tulang punggung perekonomian nasional.

Struktur ekonomi adalah komponen dari peranan sektor-sektor perekonomian suatu daerah yang dapat dilihat dari kontribusi masing-masing dalam PDRB. Sedangkan, corak perubahan struktur PDRB dapat ditunjukkan dengan melihat perubahan sumbangan masing-masing sektor terhadap produksi daerah.

Teori tentang perubahan struktur ekonomi yaitu :

1. Pola-pola Pembangunan (Sadono,1985:87)

Analisis yang dikemukakan oleh Hollis B. Chenery ini memusatkan perhatiannya kepada proses yang mengubah secara bertahap struktur ekonomi, industri dan kelembagaan pada suatu perekonomian yang terbelakang sehingga memungkinkan industri yang baru menggantikan pertanian sebagai penggerak pembangunan. Perubahan struktur ini melibatkan seluruh fungsi ekonomi termasuk transformasi produksi dan perubahan dalam komposisi permintaan konsumen perdagangan internasional dan sumberdaya serta faktor faktor sosial ekonomi seperti urbanisasi, pertumbuhan dan distribusi penduduk.

Teori ini mempunyai salah satu ciri umum dari proses pembangunan yaitu transformasi struktur produksi barang industri pada saat pendapatan per kapita meningkat. Dalam transformasi struktur ini terdapat beberapa tahap yaitu :

- a. Pembangunan struktur tahap awal digambarkan bahwa peranan *share* output industri dalam GDP meningkat dan peranan output pertanian menurun. Pada tahap ini pembangunan dicirikan oleh adanya ketergantungan terhadap produksi pertanian sebagai sumber pendapatan dan pertumbuhan.
- b. Pembangunan struktural dalam tahap atau fase kemudian yaitu tahap dimana peranan sektor pertanian dan industri seimbang. Pada fase ini pembangunan dicirikan oleh adanya ketergantungan terhadap produk barang-barang industri.

2. Teori Kuznets tentang perubahan struktur ekonomi (Todaro,2000:145)

Tingkat perkembangan struktural dan sektoral yang tinggi yang melanda segenap aspek kehidupan perekonomian merupakan penyatuan sendiri dengan proses pertumbuhan ekonomi. Beberapa komponen yang utama dari proses perubahan struktural tersebut antara lain mencakup pergeseran pemusatan aktivitas pertanian secara berangsur-angsur dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian (pergeseran tersebut juga telah berlangsung yakni dari sektor industri ke sektor jasa) perubahan besar dalam skala atau rata-rata unit produksi (yakni dari pola produksi yang ditangani oleh perusahaan-perusahaan keluarga atau perusahaan perorangan berskala kecil kearah pola produksi massal yang ditangani oleh perusahaan-perusahaan nasional dan multinasional yang bersifat impersonal).

Selain itu juga terjadi pergeseran lokasi dan status pekerjaan mayoritas angkatan kerja dari daerah pedesaan, semula mereka lebih banyak menggeluti sektor pertanian di desa asalnya tetapi kemudian bergerak ke sektor manufaktur serta jasa-jasa di daerah perkotaan.

2.3.4. Teori Ketimpangan Pendapatan Wilayah

Menurut Syafrudin dalam (Sutawijaya, 2004:39) Williamson membuat suatu langkah dengan menganalisis hubungan antara distribusi pendapatan dan pertumbuhan ekonomi pada tingkat regional di suatu negara. Williamson menggunakan data tabel silang dari 24 negara dan menemukan bahwa Negara dengan kesenjangan pendapatan wilayah terbesar selalu diikuti sekelompok negara dengan tingkat pendapatan per kapita menengah, di mana kesenjangan wilayah yang relatif kecil ditemukan baik di negara yang pertumbuhan ekonominya tinggi maupun negara berkembang.

Sedangkan menurut Rostow pada tahun 1960 mengembangkan teori penahapan pembangunan ekonomi. Teori ini menempatkan bermacam-macam isu yang berkaitan dengan pertumbuhan dan perubahan struktur ekonomi. Rostow mengusulkan lima tahapan peningkatan ekonomi yaitu; masyarakat tradisional, masa persiapan, proses tinggal landas, proses pendewasaan dan periode masyarakat konsumtif. Masyarakat tradisional berada dalam masa *equilibrium* statis dimana pertanian merupakan aktivitas dominan. Masa persiapan terjadi secara perlahan khususnya dalam perilaku dan organisasi sedangkan peningkatan ekonomi muncul sejalan dengan berubahnya kekakuan tradisional menuju mobilitas sosial, geografi dan pekerjaan. Fungsi produksi baru disesuaikan dengan kegiatan pertanian dan industri tetapi perubahannya tetap lambat.

2.4. Distribusi Pendapatan

2.4.1. Pengertian distribusi pendapatan

Distribusi pendapatan nasional adalah mencerminkan merata atau timpangnya pembagian hasil pembangunan suatu negara di kalangan penduduknya (Dumairy,1997:54).

Distribusi pendapatan dibedakan menjadi dua ukuran pokok yaitu ; distribusi ukuran, adalah besar atau kecilnya bagian pendapatan yang diterima masing-masing orang dan distribusi fungsional atau distribusi kepemilikan faktor-faktor produksi (Todaro,2000:180).

Dari dua definisi diatas maka dapat ditarik kesimpulan bahwa distribusi pendapatan mencerminkan ketimpangan atau meratanya hasil pembangunan suatu daerah atau negara baik yang diterima masing-masing orang ataupun dari kepemilikan faktor-faktor produksi dikalangan penduduknya.

2.4.2. Pembangunan dengan pemerataan

Perubahan ekonomi di samping mengejar laju pertumbuhan ekonomi juga harus memperhatikan aspek pemerataan. Ada dua argumen yang berhubungan dengan masalah pembangunan ekonomi dengan pemerataan (Todaro, 2000:212).

a. Argumen tradisional

Argumen tradisional menfokuskan lebih di dalam pengelolaan faktor-faktor produksi, tabungan dan pertumbuhan ekonomi. Distribusi pendapatan yang sangat tidak merata merupakan sesuatu yang terpaksa dikorbankan demi memacu laju pertumbuhan ekonomi secara cepat Akibat dari pengaruh teori dan kebijakan perekonomian pasar bebas, penerimaan pemikiran seperti itu oleh kalangan ekonom pada umumnya dari negara-negara maju maupun negara-negara berkembang, baik secara implisit maupun eksplisit menunjukkan bahwa mereka tidak begitu memperhatikan pentingnya masalah kemiskinan dan ketimpangan distribusi pendapatan.

Mereka tidak saja menganggap ketidakadilan pendapatan sebagai syarat yang pantas dikorbankan dalam menggapai proses pertumbuhan ekonomi secara maksimum dan bila dalam jangka panjang hal itu dianggap syarat yang diperlukan untuk meningkatkan taraf hidup penduduk melalui mekanisme persaingan penetasan kebawah (*trickle down effect*) secara alamiah.

b. Argumen tandingan

Karena terdapat banyak ekonom pembangunan yang merasa bahwa pemerataan pendapatan yang lebih adil di negara-negara berkembang tidak bisa di nomorduakan, karena hal itu merupakan suatu kondisi penting atau syarat yang harus diadakan guna menunjang pertumbuhan ekonomi (Todaro, 2000:213). Dalam argumen tandingan tersebut terdapat lima alasan yaitu ;

Pertama, ketimpangan yang begitu besar dan kemiskinan yang begitu luas telah menciptakan kondisi sedemikian rupa sehingga masyarakat miskin tidak memiliki akses terhadap perolehan kredit. Berbagai faktor ini secara bersama-sama menjadi penyebab rendahnya pertumbuhan GNP per kapita dibandingkan jika terdapat pemerataan pendapatan yang lebih besar.

Kedua, berdasarkan observasi sekilas yang ditunjang oleh data-data empiris yang ada kita mengetahui bahwa tidak seperti yang terjadi dalam sejarah pertumbuhan ekonomi negara-negara maju, orang-orang kaya di negara-negara dunia ketiga tidak dapat diharapkan kemampuan atau kesediaannya untuk menabung dan menanamkan modalnya dalam perekonomian domestik.

Ketiga, rendahnya pendapatan dan taraf hidup kaum miskin yang berwujud berupa kondisi kesehatannya yang buruk, kurang makan dan gizi dan pendidikannya yang rendah justru akan menurunkan produktivitas ekonomi mereka dan pada akhirnya mengakibatkan rendahnya pertumbuhan ekonomi nasional secara keseluruhan.

Keempat, upaya-upaya untuk menaikkan tingkat pendapatan penduduk miskin akan merangsang meningkatkannya permintaan terhadap barang-barang produksi dalam negeri seperti bahan makanan dan pakaian.

Kelima, dengan tercapainya distribusi pendapatan yang lebih adil melalui upaya-upaya pengurangan kemiskinan masyarakat, maka akan segera tercipta banyak insentif atau rangsangan-rangsangan materiil dan psikologis yang pada gilirannya akan menjadi penghambat kemajuan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa promosi pertumbuhan ekonomi secara cepat dan upaya-upaya pengentasan kemiskinan serta penanggulangan ketimpangan pendapatan bukanlah tujuan-tujuan yang saling bertentangan sehingga yang satu tidak perlu diutamakan dengan mengorbankan yang lain.

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Lokasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek penelitian (Arikunto,1998:103). Sedangkan populasi dalam penelitian ini adalah PDRB menurut sektoral Kabupaten Tangerang yang dihitung berdasarkan harga berlaku. Metode penelitian ini didasarkan pada analisis deskriptif yang bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan ekonomi Kabupaten Tangerang.

3.2. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari pihak lain atau data yang sudah diolah atau dipublikasikan oleh berbagai instansi pemerintah dan data primer, yaitu data yang diambil secara langsung pada tempat yang diteliti. Sedangkan data yang utama digunakan dalam penelitian adalah data sekunder berdasarkan urutan waktu (*time series data*)

untuk kurun waktu tahun 2010-2014. Data yang digunakan meliputi, PDRB atas dasar harga berlaku untuk Kabupaten Tangerang, data PDRB atas dasar harga berlaku yang diperinci menurut kecamatan, jumlah penduduk Kabupaten Tangerang diperinci menurut kecamatan, PDRB menurut lapangan usaha di Kabupaten Tangerang, PDRB menurut lapangan usaha kecamatan di Kabupaten Tangerang dan PDRB menurut lapangan usaha.

3.3. Teknik Sampling

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto 1998:117). Sedangkan teknik pengambilan sampelnya adalah *purposive sample*, yaitu cara pengambilan sampel didasarkan atas dasar adanya tujuan tertentu. Sampel dalam penelitian ini adalah PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2010-2014. Sedangkan secara analisis dijelaskan tentang hasil penelitian yang diperoleh dari perhitungan Indeks Williamson, LQ dan *Shift Share*.

3.4. Variabel Penelitian

a. PDRB

PDRB yang digunakan melalui pendekatan produksi, yaitu PDRB adalah jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh sembilan sektor produksi selama satu tahun, dalam menghitung PDRB yang dijumlahkan hanyalah nilai produksi tambahan sehingga dapat dihindarkan adanya perhitungan ganda (BPS, 1999:6).

b. Jumlah penduduk

Jumlah penduduk yang digunakan dalam menghitung PDRB per kapita adalah jumlah penduduk pada pertengahan tahun. Jumlah penduduk terbagi menjadi penduduk usia produktif dan non produktif dalam hal ini bukan hanya sebagai salah satu faktor produksi saja tetapi juga merupakan pencipta dan pengembang teknologi serta yang mengorganisasikan penggunaan berbagai faktor produksi.

c. Laju pertumbuhan ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi menunjukkan tingkat pertumbuhan agregat pendapatan untuk masing-masing tahun dibandingkan tahun sebelumnya (BPS, 1999:9). Laju pertumbuhan ekonomi dapat dihitung dengan cara mengurangi PDRB tahun tertentu dengan PDRB tahun sebelumnya dan hasil dari pengurangan tersebut dibagi dengan PDRB tahun sebelumnya.

d. Pendapatan per kapita

Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata penduduk suatu wilayah. Pendapatan perkapita merupakan hasil bagi antara pendapatan regional (PDRB) suatu wilayah pada tahun tertentu dengan jumlah penduduk pada pertengahan tahun (BPS, 2003:4).

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik di dalam pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi yaitu data yang diperoleh dari buku, laporan dan penerbitan lainnya dan metode wawancara / wawancara yaitu teknik komunikasi secara langsung dari sumber yang akan diteliti mengenai faktor penghambat dan pendukung pada sektor pertanian dan industri di Kabupaten Tangerang.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perkembangan Struktur PDRB Kabupaten Tangerang

1. Sektor Industri

Sektor industri di Kabupaten Tangerang mempunyai peran yang sangat besar terhadap perkembangan struktur PDRB Kabupaten Tangerang, hal ini terlihat pada perkembangan kontribusi sektor industri terhadap PDRB Kabupaten Tangerang yang perkembangannya dapat dilihat pada angka kontribusi sektor industri sebesar 41,46 persen pada tahun 2010 kemudian mengalami penurunan sebesar 40,89 persen pada tahun 2011, dan pada tahun 2012 kontribusi sektor industri terhadap PDRB angka tertinggi yaitu sebesar 41,49 persen, namun pada tahun 2013 kontribusi sektor industri terhadap PDRB mengalami penurunan menjadi 41,48 persen, sehingga sektor industri menempati urutan pertama dalam kontribusi perkembangan struktur PDRB Kabupaten Tangerang pada tahun 2010-2014.

Berdasarkan analisis LQ tahun 2010-2014, sektor industri menunjukkan nilai LQ di atas angka satu ($LQ > 1$) yaitu sebesar (1,42), (1,43), (1,42), (1,37), (1,37). Hal tersebut berarti bahwa sektor industri termasuk sektor berpotensi tinggi / sektor basis. Sedangkan nilai LQ lebih dari satu ini berarti sektor industri sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang.

Perhitungan analisis *shift share* selama tahun 2010-2014, pada sektor industri menunjukkan nilai komponen Dj sebesar -37.008.255, -31.291.988, -77.231.067, -20.628.812 hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang pertumbuhan PDRB lebih lambat dibandingkan propinsi Lampung yang dikarenakan daya saing menurun. Dari perhitungan analisis di atas sektor industri merupakan sektor yang berpotensi (tinggi) untuk dikembangkan karena merupakan sektor unggulan / basis.

2. Sektor pertanian

Perkembangan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB pada tahun 2010 sebesar 21,09 persen pada tahun 2011 bahkan sempat mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 21,83 persen, namun pada tahun 2012-2013 kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB

mengalami penurunan menjadi 20,26 persen, 20,59 persen, 19,08 persen. Walaupun sektor pertanian mengalami penurunan tiap tahun tetapi dalam perkembangan struktur PDRB masih menempati urutan kedua dalam kontribusinya terhadap PDRB kabupaten Tangerang tahun 2010-2014.

Berdasarkan analisis LQ tahun 2010-2014, sektor pertanian menunjukkan nilai LQ di bawah angka satu ($LQ < 1$) yaitu sebesar (0,84), (0,85), (0,83), (0,88), (0,89). Hal tersebut berarti bahwa sektor pertanian termasuk sektor kurang berpotensi (rendah) / sektor non basis. Sedangkan nilai LQ kurang dari satu ini berarti sektor pertanian belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang.

Perhitungan analisis *shift share* selama tahun 2010-2012, pada sektor pertanian menunjukkan nilai komponen Dj sebesar -14.841.807, -30.186.201, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian selama tahun 2010-2012 merupakan sektor yang pertumbuhan PDRB lebih lambat di bandingkan propinsi Lampung yang dikarenakan daya saing menurun. Sedangkan pada tahun 2012-2014 pada sektor pertanian menunjukkan nilai komponen Dj sebesar 31.814.406, 3.868.775,3, hal ini menunjukkan bahwa sektor pertanian selama tahun 2012-2014 merupakan sektor yang pertumbuhan PDRB lebih cepat dibandingkan propinsi Lampung yang dikarenakan daya saing meningkat. Dari perhitungan analisis di atas, sektor pertanian adalah sektor yang tidak berpotensi (rendah) untuk dikembangkan karena bukan sektor unggulan / sektor basis.

3. Sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi

Perkembangan kontribusi sektor perdagangan rumah makan dan jasa akomodasi pada tahun 2012-2014 sebesar (18,05), (17,84), (18,01), (17,89), (17,95) persen. Pada tahun 2010 sebesar 18,05 persen merupakan angka tertinggi selama periode 2010-2014, hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang memberikan kontribusi yang besar bagi perkembangan struktur PDRB Kabupaten Tangerang. Sektor ini menempati urutan ketiga dalam perkembangan struktur PDRB Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan analisis LQ tahun 2010-2014, sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi menunjukkan nilai LQ di bawah angka satu ($LQ < 1$) yaitu sebesar (0,79), (0,76), (0,75), (0,75), (0,43). Hal tersebut berarti bahwa sektor perdagangan rumah makan dan jasa akomodasi termasuk sektor kurang berpotensi (rendah) / sektor non basis. Sedangkan nilai LQ kurang dari satu ini berarti sektor perdagangan rumah makan dan jasa akomodasi belum dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang.

Perhitungan analisis *shift share* selama tahun 2010-2014, pada sektor perdagangan rumah makan dan jasa akomodasi menunjukkan nilai komponen Dj selalu bertanda negatif, hal ini menunjukkan bahwa sektor perdagangan rumah makan dan jasa akomodasi selama tahun 2010-2014 merupakan sektor yang pertumbuhan PDRB lebih lambat dibandingkan propinsi Lampung yang dikarenakan daya saing menurun. Dari perhitungan analisis di atas, sektor perdagangan rumah makan dan jasa akomodasi adalah sektor yang tidak berpotensi (rendah) untuk dikembangkan karena bukan sektor unggulan / sektor basis.

4. Sektor jasa-jasa

Di dalam perkembangan struktur PDRB Kabupaten Tangerang selama tahun 2010-2014, sektor jasa-jasa selalu menempati urutan keempat dengan kontribusi tertinggi pada tahun 2014 yaitu sebesar 11,58 persen. Sedangkan dari hasil perhitungan LQ selama tahun 2010-2014 sektor jasa-jasa menunjukkan nilai di atas satu yaitu berturut-turut sebesar (1,11), (1,25), (1,34), (1,34), (1,36) yang berarti sektor ini termasuk ke dalam sektor unggulan / basis. Artinya sektor ini tidak hanya dapat memenuhi kebutuhan daerahnya saja namun memenuhi kebutuhan dari luar daerah lainnya / berpotensi untuk melakukan ekspor.

Perhitungan analisis *shift share* selama tahun 2010-2014, pada sektor jasa-jasa menunjukkan nilai komponen Dj sebesar 24.016.529, 18.534.907,1, -9.150.129, 3.000.429,9 hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang pertumbuhan PDRB lebih cepat dibandingkan propinsi Lampung yang dikarenakan daya saing yang meningkat.

Tetapi tahun 2013 pertumbuhan PDRB lebih lambat dibandingkan propinsi Lampung. Dari perhitungan analisis di atas sektor jasa merupakan sektor yang berpotensi (tinggi) untuk dikembangkan karena merupakan sektor unggulan / basis sehingga sektor ini memiliki kinerja yang dapat diandalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

5. Sektor lembaga keuangan persewaan dan jasa perusahaan.

Besarnya kontribusi sektor lembaga keuangan persewaan dan jasa perusahaan pada tahun 2010-2014 berkisar antara 3,71 sampai dengan 3,89 persen. Perkembangan kontribusi tertinggi adalah pada tahun 2013 sementara kontribusi terendah pada tahun 2011. Pada tahun 2010-2014, sektor ini merupakan sektor yang menempati urutan pertama (dalam perkembangan struktur PDRB di bawah 10 persen) dan sektor yang menempati urutan kelima dari kesembilan sektor dalam kontribusinya terhadap PDRB Kabupaten Tangerang.

Berdasarkan analisis LQ tahun 2010-2014, sektor lembaga keuangan persewaan dan jasa perusahaan menunjukkan nilai LQ di atas angka satu ($LQ > 1$) yaitu sebesar (1,05), (1,01), (1,02), (1,05), (1,03). Hal tersebut berarti bahwa sektor lembaga keuangan persewaan dan jasa perusahaan termasuk sektor berpotensi tinggi / sektor basis. Sedangkan nilai LQ lebih dari satu ini berarti sektor ini sudah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat Kabupaten Tangerang.

Perhitungan analisis *shift share* selama tahun 2010-2014, pada sektor lembaga keuangan persewaan dan jasa perusahaan menunjukkan nilai komponen Dj sebesar -85.391.137, -558.719,63, 2.392.639,9, -5.166.999 hal ini menunjukkan bahwa sektor ini merupakan sektor yang pertumbuhan PDRB lebih lambat dibandingkan propinsi Lampung yang dikarenakan daya saing menurun. Tetapi pada tahun 2012-2013 nilai komponen Dj menunjukkan angka positif yang berarti sektor lembaga keuangan persewaan dan jasa perusahaan pada tahun tersebut pertumbuhannya lebih cepat dibandingkan propinsi yang dikarenakan daya saing yang semakin

meningkat. Dari perhitungan analisis di atas sektor lembaga keuangan persewaan dan jasa perusahaan merupakan sektor yang berpotensi (tinggi) untuk dikembangkan karena merupakan sektor unggulan / basis

BAB V PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Perkembangan struktur PDRB atas dasar harga berlaku dari tahun 2010-2014 di dominasi sektor industri, sektor pertanian, sektor perdagangan, rumah makan dan jasa akomodasi, sektor jasa-jasa. Sedangkan sektor ekonomi yang paling potensial dan strategis untuk dikembangkan guna memacu serta menunjang pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tangerang ada 2 sektor yaitu sektor industri dan sektor jasa-jasa. Sedangkan pertumbuhan PDRB di Kabupaten Tangerang lebih lambat dibandingkan dengan pertumbuhan PDRB di Propinsi Lampung
2. Secara umum kontribusi sektor pertanian dan sektor industri mengalami penurunan yang diakibatkan adanya faktor-faktor yang menghambat perkembangannya. Salah satu faktor yang menghambat perkembangan pada sektor pertanian adalah berubahnya fungsi lahan pertanian ke non-pertanian yang tidak terkendali. Sedangkan salah satu faktor yang menghambat perkembangan pada sektor industri adalah stabilitas ekonomi yang belum memadai. Untuk meningkatkan kontribusinya pemerintah daerah perlu melaksanakan berbagai program yang berguna untuk mengatasi faktor -faktor yang menghambat perkembangan sektor pertanian dan industri tersebut.

5.2 Saran

Untuk melengkapi penelitian ini agar menjadi lebih baik penulis merasa perlu memberikan saran-saran diantaranya :

1. Untuk sektor industri terutama industri kecil atau rumah tangga dan sektor jasa-jasa (seperti jasa hiburan, kemasyarakatan, perorangan, sosial) di Kabupaten Tangerang yang perkembangannya paling berpotensi sebaiknya lebih difokuskan lagi dalam pengelolaannya sehingga diharapkan nantinya dapat memberikan kontribusi sumbangan PDRB yang lebih besar dalam perekonomian daerah, sedangkan untuk sektor yang kurang memiliki potensi sebaiknya tetap diperhatikan dalam pengelolaannya agar perkembangan struktur PDRB akan menjadi seimbang.
2. Sektor pertanian yang dahulu merupakan sektor potensial yang bagus harus lebih dikembangkan dalam masyarakat, diantaranya dengan melalui berbagai program pertanian seperti salah satunya adalah program kesejahteraan petani, sehingga masyarakat dapat lebih mencintai sektor ini .
3. Sebaran distribusi pendapatan di Kabupaten Tangerang harus tetap mempertahankan Indeks Williamson di bawah 0,50, salah satunya dengan cara perkembangan pada sektor industri tidak terpusat pada beberapa kecamatan saja tetapi merata pada tiap kecamatan di Kabupaten Tangerang sehingga ketimpangan pendapatan akan semakin kecil dan distribusi pendapatan akan semakin merata dinikmati setiap penduduknya.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, Muhammad. 1987. *Penelitian Kependidikan Prosedur dan Strategi*. Angkasa. Bandung.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan dan Praktek*. Rineka Cipta. Kota Tangerang.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Pengantar Perencanaan dan Pembangunan Ekonomi daerah*. BPFE. Yogyakarta.
- Azis, Iwan Jaya. 1994. *Ilmu Ekonomi regional dan Beberapa aplikasinya Di Indonesia*. Lembaga Penerbit FE-UI. Kota Tangerang.
- Badan Pusat Statistik, 2014. *Pendapatan Regional Tangerang 2014*.
- Danim, Sudarwan. 2002. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Pustaka Setia. Bandung.
- Dewi Puspa. 2000. *Analisis Sektor Ekonomi yang Mempengaruhi pertumbuhan Ekonomi*. Penelitian Sarjana Tak Diterbitkan. Yogyakarta.
- Garis-Garis Besar Haluan Negara 1998. 1999. Intan Pariwara. Klaten.
- Haryono, Sudria Munawar. 2002. *Pengantar Studi Administrasi pembangunan*. CV. Mandar Maju. Bandung.
- Kadariah. 1985. *Ekonomi Perencanaan*. Lembaga Penerbit FE-UI. Kota Tangerang.
- Nanga, Muana. 2001. *Makro Ekonomi (Teori, Masalah, dan Kebijakan)*. PT.Grafindo Persada. Kota Tangerang.
- Nawawi, Hadari. 1993. *Prosedur Penelitian sampel*. Andi Offset. Bandung.
- Simanjuntak, J payman. 1985. *Pengantar Ekonomi sumber daya Manusia*. Lembaga Penerbit FE-UI. Kota Tangerang.
- Soepomo, Prasetyo. 1993. *Analisis Shift-share: Perkembangan dan Penerapan*. Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia.